

MEMBANGUN NEGARA IDEAL: DIALEKTIKA GAGASAN PLATO DAN AL-FARABI DALAM KONTEKS FILSAFAT POLITIK

Maisaroh

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Muktafi

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep negara ideal melalui studi komparatif antara Plato dari Yunani dan Al-Farabi dari dunia Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (Library research), dengan fokus pada karya utama *The Republic* dan *Ara' Ahl al-Madina al-Fadilah*. Analisis menunjukkan bahwa Plato menekankan rasionalitas dan raja-filsuf sebagai pemimpin ideal, sedangkan Al-Farabi menggabungkan filsafat dan kenabian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keduanya menekankan pentingnya kepemimpinan bermoral dan negara yang berfungsi untuk kebaikan bersama. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran mereka masih relevan sebagai dasar normatif dalam merumuskan sistem pemerintahan yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Negara Ideal, Plato, Al-Farabi

Abstract

*This study explores the concept of the ideal state through a comparative analysis between Plato from ancient Greece and Al-Farabi from the Islamic world. The research method employed is qualitative with a library research approach, focusing on the primary works *The Republic* and *Ara' Ahl al-Madina al-Fadilah*. The analysis reveals that Plato emphasizes rationality and the philosopher-king as the ideal ruler, while Al-Farabi combines philosophy and prophecy to achieve happiness in both the worldly and spiritual realms. Both thinkers stress the importance of moral leadership and a state that functions for the common good. The findings affirm that their ideas remain relevant as normative foundations for formulating a just, civilized, and welfare-oriented system of governance.*

Keywords: Ideal State, Plato, Al-Farabi

PENDAHULUAN

Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia, yang dinilai rentan terhadap manipulasi kepentingan politik, telah memicu refleksi

mendalam di kalangan masyarakat mengenai konsep "negara ideal." Rangkaian pengalaman ketidakadilan dan diskriminasi tidak hanya melahirkan perlawanan, namun juga mendorong munculnya berbagai aspirasi dan tuntutan akan terwujudnya negara ideal seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis: apakah seruan tentang "negara ideal" ini sekadar menjadi alat legitimasi politik, ataukah justru menyimpan potensi sebagai peta jalan untuk mencapai masyarakat yang adil dan damai?

Plato dan Al-Farabi merupakan dua tokoh penting di antara sekian banyak pemikir yang mengemukakan gagasan mengenai konsep negara ideal. Plato berpendapat bahwa bentuk negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh para filsuf. Argumentasi Plato didasarkan pada keyakinannya bahwa negara yang adil dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila pemegang kepemimpinan dipegang oleh akal budi, sebab hanya akal yang dinilai mampu mengarahkan manusia menuju kebijaksanaan¹.

Kajian mengenai konsep negara ideal menurut Al-Farabi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah satu penelitian yang relevan adalah tulisan Sukron Maksudi dan Moh. Samhadi dalam jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara (2024) yang berjudul "Konsep Negara Utama Perspektif Al-Farabi dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara." Dalam kajian tersebut, Al-Farabi menggambarkan negara utama (Al-Madinah Al-Fadilah) sebagai struktur tubuh manusia yang sehat dan sempurna, di mana setiap organ menjalankan fungsinya demi tercapainya kesempurnaan kolektif. Pemimpin diposisikan sebagai jantung negara yang menjadi pusat kebijakan dan moralitas, sementara masyarakat menjadi unsur penting yang harus diarahkan

¹ Muhammad Farid, "konsep negara dalam perspektif plato dan al-mawardi," n.d.hlm,34

melalui pendidikan dan pembentukan karakter agar tercapai kehidupan bernegara yang harmonis dan adil²

Selain Al-Farabi, Plato juga menjadi tokoh sentral dalam pemikiran mengenai negara ideal. Dalam penelitian oleh Sylvira Nur Andini dkk. (2024) yang dimuat dalam Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, dijelaskan bahwa Plato melihat keadilan sebagai kondisi harmoni batin di mana setiap elemen jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya akal mengendalikan nafsu dan semangat. Dalam The Republic, Plato menggambarkan negara ideal sebagai cerminan dari struktur jiwa yang seimbang, di mana para pemimpin (raja-filsuf) memiliki kebijaksanaan dan kebijakan sebagai dasar dari pemerintahan yang adil. Hukum dalam pandangan Plato bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi instrumen kebijakan kolektif yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang benar, harmonis, dan Sejahtera³

Sementara itu, penelitian dari Muhamad Fajar Pramono and Muhammad Iqbal Oki Akbar dalam jurnal “Al-Madinah al-Fadilah in Islamic Political Philosophy: Exploration of al-Farabi’s Thought” ,menyoroti aspek integrasi antara filsafat, agama, dan politik dalam pemikiran Al-Farabi. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Al-Farabi, negara ideal tidak hanya dipimpin oleh orang yang bijaksana, tetapi juga oleh pemimpin yang mampu memahami wahyu serta berpikir filosofis. Negara menurut Al-Farabi tidak semata-mata entitas politik, melainkan juga wadah aktualisasi etika dan nilai-nilai kenabian. Gagasan ini menunjukkan bahwa politik dan agama dalam pandangan Al-

² Sukron Maksudi and Moh Samhadi, “konsep negara utama perspektif al-farabi dan relevansinya dalam kehidupan bernegara” 05, no. 4 (2024).Hlm, 69

³ Sylvira Nur Andini et al., “Konsep Hukum dan Keadilan Plato,” n.d.hlm,10

Farabi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya menjadi fondasi moral dalam membentuk masyarakat yang baik.⁴

Memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan masa kini, terutama di Indonesia, bukan semata karena kurangnya kecerdasan pemimpin, melainkan karena absennya karakter filosofis yaitu keberanian mencintai kebenaran dan kebijaksanaan sebagai landasan tindakan politik. Dalam hal ini, pemikiran Plato tentang negara yang dipimpin oleh filsuf menemukan momentumnya kembali: bahwa hanya pemimpin yang berhikmat dan berintegritas moral yang mampu menuntun masyarakat menuju tatanan yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan gagasan Al-Farabi, yang menekankan pentingnya pemimpin berilmu dan beretika, sebagai refleksi dari nilai-nilai kenabian dalam kehidupan bernegara.⁵

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, terlihat bahwa Plato dan Al-Farabi memiliki basis pemikiran yang kuat dalam merumuskan negara ideal. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya peran pemimpin yang berhikmat, namun dengan pendekatan yang berbeda: Plato bertumpu pada struktur jiwa dan rasionalitas, sedangkan Al-Farabi mengintegrasikan filsafat dengan nilai-nilai kenabian. Penelitian ini tidak hanya berupaya membandingkan konsep-konsep tersebut secara filosofis, tetapi juga melihat relevansi keduanya dalam konteks kehidupan bernegara masa kini, khususnya di Indonesia yang tengah mengalami krisis integritas dan moral dalam kepemimpinan.

⁴ Muhamad Fajar Pramono and Muhammad Iqbal Oki Akbar, "Al-Madinah al-Fadilah in Islamic Political Philosophy: Exploration of al-Farabi's Thought," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1015–29.hlm, 1021

⁵ Elsani Bungan Layuk et al., "*model kepemimpinan menurut plato dan relevansinya terhadap pemimpin masa kini*," n.d.hlm, 343

Metode Penelitian

Penelitian ini penting karena menawarkan refleksi kritis terhadap wacana negara ideal dari dua perspektif peradaban yang berbeda Yunani dan Islam yang kerap kali dipisahkan dalam studi politik. Dengan pendekatan komparatif-kualitatif, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana perbandingan konsep negara ideal menurut Plato dan Al-Farabi, dan sejauh mana konsep-konsep tersebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan model negara yang adil dan beradab di era kontemporer?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber utama yang dianalisis meliputi karya-karya asli kedua tokoh, seperti *The Republic* karya Plato dan *Ara Ahl al-Madina al-Fadila* karya Al-Farabi, serta kajian-kajian sekunder dari berbagai jurnal ilmiah dan buku filsafat politik. Analisis dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen utama seperti struktur pemerintahan, peran pemimpin, relasi antara individu dan negara, serta nilai-nilai dasar yang menopang kehidupan bernegara.

Penelitian ini bertujuan menggali dan membandingkan secara mendalam fondasi konseptual negara ideal menurut kedua tokoh besar tersebut, serta mengevaluasi relevansinya dalam menjawab tantangan kepemimpinan dan moralitas politik di era kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap diskursus filsafat politik, khususnya dalam membentuk model kepemimpinan dan kenegaraan yang berkeadaban dan berkeadilan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Biografi Plato dan Al-Farabi

1. Biografi Plato

Plato adalah salah satu filsuf besar di Yunani kuno yang lahir pada tahun 427 SM – 347 SM. Ia merupakan murid Socrates, seorang matematikawan Yunani, dan juga pendiri akademi politik yang merupakan sekolah tinggi pertama di Athena. Plato terlahir dalam keluarga bangsawan dari pasangan Ariston dan Perishon, keluarga ningrat yang berhasil mendirikan sistem demokrasi di Athena, dan juga merupakan keturunan raja Codrus (1068 SM) yang termasuk dalam silsilah raja terakhir Athena. Plato memiliki karya sebanyak 36 dan yang paling terkenal adalah buku yang berjudul *THE REPUBLIK* pembahasan dalam buku tersebut mengacu terhadap pendapat yang dikemukakan plato mengenai keadilan merupakan kunci dari “konsep negara ideal”⁶. Plato meninggal pada tahun 347 M lebih tepatnya ketika usianya mencapai 80 tahun.

Karya karya Plato

- a. Politeia (Republic) – Karya paling terkenal Plato. Membahas keadilan, bentuk negara ideal, dan teori "Filsuf Raja".
- b. Phaidon – Terkenal karena membahas jiwa dan keabadiannya, serta dialog menjelang kematian Sokrates.
- c. Symposium – Populer karena pembahasan mendalam tentang cinta (eros) secara filosofis.
- d. Phaidros – Dikenal karena menggabungkan teori jiwa dengan seni retorika dan cinta
- e. Timaeos – Penting dalam sejarah filsafat alam dan kosmologi⁷

⁶ Sari Agustiani, Abd Haris, dan Rosichin Mansur, "Pendidikan Menurut Perspektif Tokoh Filsuf Barat," *Jurnal Sustainable* 6, no. 2 (2023), Hlm, 818

⁷ Enjang Enjang and Didi Supandi, "Analisis Pandangan Idealisme Plato Tentang Konsep Pendidikan," *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2024): 148-149.

2. Biografi Al-Farabi

Abu Nasr Muhammad bin Muhammad al-Farabi lahir pada tahun 872 M di Wasij, Farab, dan wafat pada tahun 950 M di Damaskus. Ia dikenal sebagai salah satu filsuf besar dalam tradisi filsafat Islam, dan dijuluki 'Guru Kedua' setelah Aristoteles karena peran pentingnya dalam mentransmisikan dan mengembangkan filsafat Yunani klasik ke dalam dunia Islam⁸ Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Madina al-Fadhilah, di mana Al-Farabi menyampaikan pandangan filosofisnya tentang struktur negara ideal. Karya ini menjadi rujukan penting dalam memahami filsafat politik Islam klasik⁹

Al-Farabi menempuh pendidikan di Baghdad, yang saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Ia mempelajari logika, musik, matematika, dan terutama filsafat. Dalam pencarian intelektualnya, ia juga bepergian ke berbagai kota seperti Harran, Aleppo, dan Damaskus, tempat ia akhirnya meninggal dunia¹⁰ Dalam pengaruhnya terhadap pemikiran Islam, Al-Farabi mampu memadukan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam bidang etika dan politik. Pemikirannya tentang negara ideal menjadi dasar bagi banyak pemikir Muslim setelahnya dalam merumuskan konsep pemerintahan yang adil dan berdasarkan Kebajikan.

Karya karya Al-Farabi

⁸ Muttaqim, M. (2022). Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2).

⁹ Akbar, M. (2018). Konsep Negara Utama Al-Farabi.

¹⁰ Yumiantika, & Dewantara, J. A. (2021). Keterkaitan Pemikiran Al-Farabi dengan Konsep Kehidupan Bernegara.

¹¹ Mukhtar, M. A. (2017). Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi.

- a. Ara Ahl al-Madinah al-Fadhlah- Karya paling fenomenal Al-Farabi Membahas konsep negara ideal (al-Madinah al-Fadhlah), politik, masyarakat, pemilihan pemimpin, dan tujuan hidup bernegara.
- b. Al-Siyasahal-Madaniyah (Politik Kenegaraan)- Membahas aspek etika dan politik dalam kehidupan bernegara.

B. Konsep Negara Ideal Plato dan Al-Farabi

1. Pemikiran Negara Ideal Plato

Plato merupakan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah pemikiran politik Barat. Gagasan utamanya mengenai negara ideal tertuang secara sistematis dalam karya monumental *Politeia* (The Republic). Dalam karyanya tersebut, Plato menggambarkan negara ideal bukan sekadar sebagai struktur sosial-politik, tetapi sebagai cerminan dari struktur jiwa manusia. Bagi Plato, negara merupakan analogi dari jiwa; keseimbangan dalam negara mencerminkan keseimbangan dalam diri manusia. Negara ideal hanya dapat tercipta bila setiap unsur dalam masyarakat menjalankan fungsinya secara harmonis, sama halnya dengan bagaimana elemen dalam jiwa manusia berfungsi secara seimbang.

Plato membagi jiwa manusia ke dalam tiga elemen utama: *logistikon* (akal/nalar), *thumos* (semangat/keberanian), dan *epithumia* (nafsu/kebutuhan jasmani). Ketiga elemen ini masing-masing memiliki manifestasi dalam struktur sosial: kelas penguasa atau filsuf (akal), kelas penjaga atau tentara (semangat), dan kelas pekerja seperti petani, pedagang, dan pengrajin (nafsu). Dalam negara ideal, keadilan tercapai ketika setiap kelas menjalankan peranannya secara tepat sesuai kodratnya, tanpa mencampuri peran kelas lain.

Inilah yang oleh Plato disebut sebagai keadilan: harmoni dalam keberagaman fungsi sosial¹².

Keadilan dalam negara ideal Plato bukanlah persamaan hak dalam arti modern, melainkan keteraturan fungsional. Filsuf sebagai pemegang akal memiliki kapasitas untuk memimpin karena memiliki pengetahuan akan kebaikan sejati. Tentara sebagai manifestasi semangat bertugas menjaga negara dari ancaman, sedangkan kelas pekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketika setiap unsur ini bekerja sesuai perannya tanpa melampaui batas, maka terwujudlah keadilan dalam negara¹³.

Plato menegaskan bahwa hanya mereka yang mampu mengakses dunia ide yang dapat menjadi pemimpin sejati. Dunia ide merupakan realitas sejati yang bersifat abadi dan sempurna, berbeda dengan dunia empiris yang penuh ilusi. Pengetahuan terhadap *idea tou agathou* (ide tentang kebaikan) merupakan syarat utama bagi seorang raja-filsuf. Oleh sebab itu, pendidikan memainkan peran penting dalam menyaring siapa yang layak menjadi pemimpin. Proses pendidikan bagi calon penguasa harus panjang, ketat, dan filosofis, sehingga hanya mereka yang benar-benar mencintai kebenaran yang dapat menduduki posisi tertinggi.¹⁴

Struktur negara ideal Plato bersifat hirarkis dan ketat. Filsuf dan tentara tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi atau keluarga, karena kekayaan dianggap sebagai sumber korupsi dan konflik kepentingan. Mereka hidup bersama dalam komunitas komunal yang diatur ketat oleh negara.

¹² Elsa Qurbatu Sifa dkk., "Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 19-20

¹³ Ismi Nurhayati et al., "Konsep Keadilan Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).Hlm 12-13

¹⁴ Dules Ery Pratama Hrp and Yakobus Ndona, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora Dalam* 2, no. 3 (2024): 4 -5.

Sementara itu, kelas pekerja diperbolehkan memiliki kekayaan, namun tetap berada di bawah pengawasan moral dari kelas atas. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan keseimbangan negara. Dalam pandangan Plato, kebahagiaan individu tunduk pada kebahagiaan kolektif, dan negara ideal berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebijakan bersama.¹⁵

Meskipun idealisme Plato seringkali dikritik sebagai utopis dan tidak realistik, konsepnya tetap memberikan kontribusi besar dalam sejarah filsafat politik. Ia menawarkan model pemerintahan yang berorientasi pada keutamaan moral dan intelektual, bukan sekadar kekuasaan. Negara ideal menurut Plato adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang bijak yang bebas dari ambisi pribadi, serta masyarakat yang taat pada kodrat dan tugasnya masing-masing.¹⁶

Plato menegaskan Kembali bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan dibanding kepentingan individu, demi menciptakan semangat kolektivisme dan menghindari individualisme. Ia merupakan pelopor ide kesetaraan kesempatan tanpa memandang jenis kelamin. Dalam struktur sosial, Plato mengusulkan komunisme terbatas untuk kelas penguasa dan pembantunya, yang melarang kepemilikan pribadi serta kehidupan berkeluarga agar dedikasi terhadap negara tidak terganggu. Sementara itu, kelas pekerja diperbolehkan memiliki harta dan keluarga karena mereka bertanggung jawab dalam menopang aktivitas ekonomi negara.

Menurut Plato, hak milik pribadi dapat menimbulkan kecemburuan, kesenjangan, dan kompetisi bebas yang berujung pada disintegrasi negara.

¹⁵ Leni Andariati, "Filsafat Politik Plato," *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (June 1, 2020): 88–115, <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.Hlm 109 - 111>

¹⁶ Muhammad Fadhlil et al., "negara dalam perspektif plato," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).Hlm, 8-10

Anak-anak pun dibesarkan oleh negara agar tidak memiliki keterikatan keluarga dan lebih loyal pada komunitas bersama.

Plato berpandangan bahwa negara tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia secara keseluruhan, bukan individu per individu. Ia menolak pandangan Epicurus yang menjadikan kesenangan pribadi sebagai tujuan utama negara. Bagi Plato, negara adalah bentuk persekutuan tertinggi yang harus menjamin tercapainya kebaikan tertinggi bagi manusia, baik secara jasmani, rohani, maupun intelektual. Negara ideal adalah yang memanusiakan manusia dan mendorong warganya menuju kesempurnaan hidup melalui kebijakan dan moralitas. Dalam pandangan ini, negara menjadi sarana utama bagi manusia untuk berkembang secara utuh dan hidup sesuai dengan kodratnya¹⁷

2. Konsep Negara Ideal Al Farabi

Al-Farabi memulai penjelasan tentang Negara utama dengan membahas asal-usul terbentuknya Negara. Ia berpendapat bahwa karena setiap individu memiliki kepentingan yang sama, maka akan lebih mudah menyatukan pandangan mereka ke arah satu ideologi dalam Negara utama. Untuk mewujudkan Negara utama, diperlukan kerja sama kolektif antarwarga.

Meskipun Al-Farabi tidak menghapus hak-hak individu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kerjasama tersebut, setiap warga dapat menyampaikan gagasannya (ârâ) dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga penyelesaian masalah dapat ditemukan secara lebih cepat dan efektif. Dengan cara ini, tujuan utama dari

¹⁷ M Fahmi, Zaki Al Zurga, and Joko Umbaran, "Kajian Komprehensif Tujuan Negara Berdasarkan Pemikiran Socrates Dan Plato," *Aeterna* 1, no. 1 (2024):37-38.

Negara utama (*al-Madînah al-Fâdlîyah*), yakni kebahagiaan lahir dan batin, material maupun spiritual, serta duniawi dan ukhrawi, dapat tercapai.¹⁸

Untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin di Negara utama, warga Negara harus menjalani nilai-nilai keutamaan yang mampu membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Menurut Al-Farabi, warga Negara hendaknya memiliki akhlak yang mulia dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjadi manusia sempurna (*insân kâmil*).¹⁹

Melalui nilai-nilai keutamaan tersebut, setiap individu bisa mencapai kebahagiaan baik secara fisik maupun spiritual. Masing-masing orang menjalankan perannya berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, dibawah kepimpinan seorang kepala Negara yang memiliki beragam keterampilan. Kepala Negara dipandang sebagai seorang pengajar (*mu'allim*), karena perannya dalam mendidik rakyat. Ia juga merupakan seorang pendidik (*muaddib*), yang mencerminkan sifat kenabian (*nubuwah*) dalam membimbing masyarakat menjadi manusia yang utama.²⁰

Al-Farabi membagi jenis Negara berdasarkan ideologi yang dianut, bukan menurut bentuk pemerintahan seperti monarki, absolutisme, atau demokrasi. Ia tidak sepakat dengan pembagian Negara modern yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan, atau hukum. Al-Farabi justru menawarkan konsepnya sendiri mengenai Negara. Oleh karena itu, ia tidak hanya merumuskan gagasan utama, tetapi juga menyusun pandangan mengenai bentuk Negara yang berlawanan dengan Negara ideal²¹.

¹⁸ Abu Nashr al-Farabi, *op. Cit.*, h. 121-122.

¹⁹ *Ibid.*, Abu Nashr al-Farabi, h. 101.

²⁰ Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 113.

²¹ *Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 102.

Menurut Al-Farabi, Negara utama/Ideal adalah Negara yang dibentuk oleh warga Negara dengan tujuan utama yang jelas, yaitu meraih kebahagiaan. Dalam karyanya *Arâ Ahl Madînah al-Fâdlîlîh*, dijelaskan bahwa suatu Negara dapat menjadi Negara utama jika masyarakatnya memiliki pemahaman mendalam, antara lain: warga memiliki kecerdasan baik secara spiritual maupun material yang dapat membawa mereka menuju akal aktif; mereka memahami sebab-musabab pertama serta tujuan eksistensi manusia. Dari kondisi inilah lahir kota utama, yaitu masyarakat yang berhasil mencapai kebahagiaan yang didambakan.²²

Hal ini juga ditegaskan dalam buku *Arâ Ahl Madînah al-Fâdlîlîh* karya M. Zainal Abidin yang merujuk pada karya Al-Farabi *As-Siyâsah al-Madaniyyah*, di mana kebahagiaan dianggap sebagai kebaikan tertinggi yang menjadi tujuan akhir manusia. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui ilmu-ilmu pengetahuan serta usaha yang sungguh-sungguh. Pemahaman tentang kebahagiaan sejati hanya mungkin diperoleh apabila seseorang telah memahami makna dari keutamaan. Dalam bukunya *Tâhsîl as-Sa'âdah*, Al-Farabi menyebutkan bahwa keutamaan yang membawa pada kebahagiaan mencakup pengetahuan, kebijaksanaan, serta akhlak dalam bertindak dan berpikir.²³

Untuk mewujudkan nilai-nilai keutamaan tersebut, setiap warga Negara utama/Ideal harus memiliki kualitas dan kemampuan tertentu yang membuat mereka dan mampu berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, keberadaan pemimpin sangat menentukan keberhasilan pencapaian

²² Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, h. 146.

²³ Ahmad Zainal Abidin, *op. Cit.*, h. 72.

Negara utama. Oleh karena itu, pemimpin haruslah seseorang yang memiliki kapasitas dan keunggulan melebihi seluruh rakyatnya.²⁴

Al-Farabi menyatakan bahwa kebahagiaan tidak akan bisa diraih tanpa ilmu dan kerja keras. Kebahagiaan yang dimaksud adalah *sa'âdah mâdiyyah wa ma'nawiyyah* yakni kebahagiaan jasmani dan rohani, lahir dan batin, yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat.²⁵ Untuk meraih kebahagiaan sempurna tersebut, tidak cukup dengan upaya individu. Negara harus menyatukan seluruh potensi masyarakatnya, menyusun strategi yang terarah, dan melaksanakan pembangunan secara terencana dan kolektif.²⁶

Selain menekankan pentingnya kepemilikan bersama, Al-Farabi juga mengakui hak milik individu sebagai hasil dan kecakapan dan kerja keras, asalkan tetap sejalan dengan keadilan sosial yang dijunjung oleh Negara utama/Ideal. Menurut Al-Farabi, Negara Ideal dapat dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan sempurna.²⁷ Setiap organ dalam tubuh memiliki fungsi dan peran masing-masing yang saling bekerja sama secara harmonis. Diantara organ-organ tersebut, jantung merupakan bagian paling vital karena berfungsi sebagai pengendali utama. Dalam konteks ini, Al-Farabi menyamakan posisi jantung dengan peran pemimpin dalam Negara utama. Pemimpin memiliki peranan krusial dalam mengarahkan Negara menuju tujuannya, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Karena pentingnya peran pemimpin, Al-Farabi menegaskan bahwa kepala Negara harus berasal dari kalangan filosof yang juga memiliki karakter kenabian, atau yang ia sebut sebagai *Philosopher Prophet*. Ia menetapkan dua

²⁴ *Ibid.*, Ahmad Zainal Abidin h. 112.

²⁵ Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, h. 105-106.

²⁶ Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, 113.

²⁷ *Ibid.*, h. 118.

belas syarat bagi pemimpin ideal yang disebutnya sebagai *Imām*. Jika tidak ada sosok yang memenuhi seluruh kriteria tersebut, Al-Farabi menawarkan alternatif pemimpin yang disebutnya *al-Ra'īs*.

Dalam karyanya *Ārā Ahl Madīnah al-Fādlilah*, Al-Farabi membedakan Negara berdasarkan ideology yang dianut warganya. Negara Utama/Ideal diisi oleh warga yang berideologi benar, yakni yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Sebaliknya, Negara-negara yang menjadi lawan dari Negara Utama/Ideal adalah Negara-negara yang keliru, yang menitikberatkan pada keseimbangan dunia semata.

C. Tipologi Negara Ideal Al-Farabi dan Plato

1. Persamaan

Plato dan Al-Farabi sama-sama menempatkan pemimpin yang bijaksana sebagai poros utama negara ideal. Dalam karya *The Republic*, Plato menggambarkan negara ideal sebagai entitas yang dipimpin oleh raja-filsuf, yaitu individu yang mampu memahami kebaikan sejati melalui akal dan pendidikan yang ketat. Ia menilai bahwa hanya orang yang telah memahami idea tou agathou (ide tentang kebaikan) yang layak memimpin masyarakat menuju keadilan dan keteraturan sosial²⁸

Pemikiran Al-Farabi tentang negara ideal tidak jauh berbeda. Dalam *Ara' Ahl al-Madina al-Fadilah*, ia menyebut bahwa negara ideal hanya dapat terbentuk apabila dipimpin oleh seorang yang memiliki karakter kenabian dan kemampuan filosofis tinggi. Pemimpin yang disebut sebagai *Philosopher*

²⁸ berlina berlina et al., "model kepemimpinan menurut plato dan relevansinya terhadap pemimpin masa kini," *humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, no. 2 (2025): 348-349.

Prophet ini bertugas memimpin masyarakat menuju sa'ādah atau kebahagiaan sejati yang mencakup aspek dunia dan akhirat²⁹

Selain aspek kepemimpinan, keduanya juga menyusun struktur sosial-politik berdasarkan analogi tubuh manusia atau jiwa. Plato membagi masyarakat ke dalam tiga kelas utama: penguasa (akal), penjaga (semangat), dan produsen (nafsu)³⁰. Sementara Al-Farabi menganalogikan negara dengan tubuh manusia yang sehat, di mana tiap organ (anggota masyarakat) menjalankan fungsinya masing-masing dengan harmonis, dan jantung (pemimpin) berperan mengatur keseluruhan sistem³¹

Keduanya juga menolak gagasan sebagai arena kekuasaan semata. Bagi Plato dan Al-Farabi, negara adalah alat untuk menciptakan kebaikan kolektif dan kesempurnaan manusia secara moral dan intelektual. Negara ideal bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi wahana transformasi diri menuju nilai-nilai kebaikan yang luhur.

2. Perbedaan

Walaupun memiliki kesamaan dalam struktur dasar negara ideal, terdapat perbedaan penting antara Plato dan Al-Farabi, terutama pada landasan nilai dan tujuan akhir dari negara itu sendiri. Plato menekankan rasionalitas dan keselarasan jiwa sebagai inti dari keadilan dan tatanan negara. Negara ideal menurut Plato adalah perwujudan dari struktur jiwa yang seimbang, di mana setiap bagian jiwa menjalankan perannya sesuai kodrat. Pemimpin tidak harus memiliki legitimasi religius, tetapi harus melalui

²⁹ Sukron Maksudi dan Moh. Samhadi, "Konsep Negara Utama Perspektif Al-Farabi dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegrave," *Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 2024.Hlm, 70

³⁰Elsa Qurbatu Sifa dkk., "Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 19-20

³¹ Richo Bintang Mahendra, "Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi Dan Platon," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2021): 114-33.Hlm, 126

pendidikan panjang yang memurnikan akal dan membebaskan dari ilusi dunia indrawi³²

Sebaliknya, Al-Farabi mengintegrasikan filsafat dengan wahyu, menjadikan nilai-nilai kenabian sebagai fondasi politik. Negara ideal dalam pandangan Al-Farabi bertujuan menciptakan kebahagiaan sempurna (al-sa'ādah al-kāmilah), yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Karena itu, pemimpin harus memiliki sifat kenabian dan mampu menuntun rakyat bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga dalam perjalanan spiritual menuju kebaikan tertinggi³³.

Dari aspek pemilihan pemimpin, Plato menggunakan pendekatan meritokrasi rasional, sedangkan Al-Farabi memberikan syarat yang lebih kompleks, termasuk penguasaan filsafat, syariat, kemampuan orasi, keberanian, hingga keadilan personal³⁴

3. Relevansi di Era Saat Ini

Pemikiran Plato dan Al-Farabi menjadi sangat relevan di tengah krisis kepemimpinan dan kemerosotan etika politik pada era kontemporer, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Gagasan bahwa negara harus dipimpin oleh individu yang bijak dan bermoral sangat penting untuk menjawab permasalahan kepemimpinan transaksional, politik identitas, dan korupsi yang merajalela. Dalam konteks Plato, relevansinya terletak pada pentingnya pendidikan calon pemimpin yang tidak hanya unggul secara teknokratik, tetapi juga secara moral dan intelektual. Ia menekankan bahwa

³² Dules Ery Pratama Hrp and Yakobus Ndona, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 03.

³³ Sukron Maksudi dan Moh. Samhadi, "Konsep Negara Utama Perspektif Al-Farabi dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara," *Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 2024.Hlm, 70

³⁴ Maksudi and Samhadi, "KONSEP NEGARA UTAMA PERSPEKTIF AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.".Hlm, 70

hanya pemimpin yang mampu membedakan kebaikan sejati yang layak memimpin masyarakat³⁵.

Sementara itu, pemikiran Al-Farabi memberi kontribusi penting dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Integrasi antara nilai-nilai religius, etika, dan filsafat menjadi tawaran alternatif untuk menghindari sekularisme ekstrem maupun fanatisme agama. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual dan memiliki karakter kenabian sebuah gagasan yang masih sangat kontekstual dalam tantangan kebangsaan hari ini³⁶. Keduanya menekankan pentingnya keadilan, pendidikan moral, dan keteraturan sosial sebagai fondasi negara. Oleh karena itu, konsep negara ideal menurut Plato dan Al-Farabi tetap relevan dijadikan pijakan dalam perumusan model pemerintahan modern yang berkeadaban, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

KESIMPULAN

Plato memandang negara ideal sebagai cerminan jiwa manusia yang harmonis, terdiri dari tiga kelas utama dengan raja-filsuf sebagai pemimpin yang memahami kebaikan sejati melalui pendidikan dan rasionalitas. Al-Farabi merumuskan al-Madinah al-Fadilah sebagai negara utama yang dipimpin oleh sosok yang memadukan filsafat dan kenabian untuk membawa masyarakat pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tipologi negara ideal keduanya menggambarkan struktur sosial yang bertujuan pada kebaikan kolektif dan kemajuan moral. Persamaan pemikiran terletak pada pentingnya

³⁵ Berlina dkk., "Refleksi Kepemimpinan Masa Kini dalam Pemikiran Plato dan Al-Farabi," *Jurnal Pemikiran Politik Kontemporer*, 2025, hlm, 349

³⁶ Mahendra, "Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi Dan Platon." hlm, 126

pemimpin yang bijak, bermoral, dan terdidik sebagai poros negara. Perbedaan mendasar ada pada dasar pendekatan: Plato berlandaskan rasionalitas dan filsafat sekuler, sedangkan Al-Farabi mengintegrasikan akal dengan nilai-nilai wahyu. Di era kontemporer, pemikiran mereka tetap relevan dalam merespons krisis etika dan kepemimpinan. Gagasan Plato tentang pendidikan moral dan tatanan adil, serta konsep Al-Farabi tentang sintesis akal dan spiritualitas, memberikan landasan normatif bagi pembangunan sistem pemerintahan modern yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariati, Leni. "Filsafat Politik Plato." *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (June 1, 2020): 88–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>.
- Andini, Sylvira Nur, Mahanda Purnifa Nesa, Sifa Fadilah, and Mohammad Alvi. "Konsep Hukum dan Keadilan Plato," n.d.
- Akbar, M. (2018). Konsep Negara Utama Al-Farabi.
- Al-Farabi. (2000). *Ârâ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*. Beirut: Daar al-Masyriq.
- Al-Farabi. (1349 H). *Tahsîl as-Sâ'âdah*. Hyderabad: Majlis Daa'irah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah.
- Al-Farabi. (1850). *As-Siyâsah al-Madaniyyah*. London: Moses ben Tebon (transl.).
- Ahmad, Z. A. (1968). Negara Utama. Jakarta: P.T. Kinta.
- Berlina, Berlina, Elsani Bungan Layuk, Liliana Yanti Randa, Ratna Dekak, and Suleman Borotoding. "MODEL KEPEMIMPINAN MENURUT PLATO DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMIMPIN MASA KINI." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, no. 2 (2025): 342–51.

- Enjang, Enjang, and Didi Supandi. "Analisis Pandangan Idealisme Plato Tentang Konsep Pendidikan." *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2024): 143–54.
- Fad hail, Muhammad, Enrico Zico Sudrajat, Febrian Nanda, and Pandu Azkal Azkiyai Bintang. "NEGARA DALAM PERSFEKTIF PLATO." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).
- Fahmi, M, Zaki Al Zurga, and Joko Umbaran. "Kajian Komprehensif Tujuan Negara Berdasarkan Pemikiran Socrates Dan Plato." *Aeterna* 1, no. 1 (2024): 32–39.
- Farid, Muhammad. "KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF PLATO DAN AL-MAWARDI," n.d.
- Fakhry, M. (1983). *A History of Islamic Philosophy* (2nd ed.). New York: Columbia University Press.
- Hrp, Dules Ery Pratama, and Yakobus Ndona. "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 01–07.
- Hitti, P. K. (1956). *History of the Arabs* (6th ed.). London: Macmillan.
- — —. "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 01–07.
- Layuk, Elsani Bungan, Liliana Yanti Randa, Ratna Dekak, and Suleman Borotoding. "MODEL KEPEMIMPINAN MENURUT PLATO DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMIMPIN MASA KINI," n.d.
- Mahendra, Richo Bintang. "Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi Dan Platon." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2021): 114–33.

Maksudi, Sukron, and Moh Samhadi. "KONSEP NEGARA UTAMA PERSPEKTIF AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA" 05, no. 4 (2024).

Mukhtar, M. A. (2017). Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi.

Muttaqim, M. (2022). Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2).

Nurhayati, Ismi, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1, no. 01 (2022).

Pramono, Muhamad Fajar, and Muhammad Iqbal Oki Akbar. "Al-Madinah al-Fadilah in Islamic Political Philosophy: Exploration of al-Farabi's Thought." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1015-29

Qurbatu, Elsa Sifa dkk., "Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato," Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 2 (2024)

Sjadzali, M. (1993). Islam dan Negara. Jakarta: UI Press.

Yumiantika, & Dewantara, J. A. (2021). Keterkaitan Pemikiran Al-Farabi dengan Konsep Kehidupan Bernegara.

Yamani. (2002). Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini. Bandung: Mizan.